

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital mendorong meningkatnya penggunaan kontrak elektronik dalam berbagai layanan berbasis internet, termasuk aplikasi Worldcoin yang memproses data biometrik berupa pemindaian iris mata untuk menghasilkan identitas digital (World ID). Dalam *Terms and Conditions*-nya terdapat klausul pembatasan tanggung jawab yang membatasi atau mengesampingkan tanggung jawab penyelenggara atas kehilangan data, serangan siber, maupun kerugian pengguna. Klausul tersebut menimbulkan persoalan hukum karena data biometrik merupakan data pribadi yang bersifat spesifik dan memperoleh perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji : (1) apakah klausul pembatasan tanggung jawab dalam *Terms and Conditions* Worldcoin dibenarkan menurut UU PDP; dan (2) bagaimana tanggung jawab hukum pengendali data terhadap kebocoran atau penyalahgunaan data biometrik pengguna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul pembatasan tanggung jawab Worldcoin bertentangan dengan ketentuan UU PDP karena menghilangkan tanggung jawab pengendali data yang secara hukum wajib menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi. Klausul tersebut tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab pengendali data sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskan penyelenggara dari tanggung jawab hukum. Pengendali data tetap bertanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana apabila terjadi pelanggaran perlindungan data pribadi akibat kelalaiannya.

**Kata kunci : Data biometrik; Kontrak elektronik; Worldcoin.**

## **ABSTRACT**

Advances in digital technology have driven the increasing use of electronic contracts in various internet-based services, including the Worldcoin app, which processes biometric data specifically iris scans to generate a digital identity (World ID). Its Terms and Conditions contain a liability limitation clause that limits or excludes the provider's liability for data loss, cyberattacks, or user losses. This clause raises legal issues because biometric data constitutes specific personal data that is entitled to special protection under Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law). This study aims to examine: (1) whether the liability limitation clause in Worldcoin's Terms and Conditions is justified under the PDP Act; and (2) the legal liability of the data controller regarding the leakage or misuse of users' biometric data. This study employs a normative legal research method using both a statutory and a conceptual approach. Legal materials were obtained through a literature review encompassing primary, secondary, and tertiary sources, which were then analyzed descriptively. The results of the study indicate that Worldcoin's liability limitation clause conflicts with the provisions of the Personal Data Protection Act (PDP Act) because it eliminates the liability of the data controller, who is legally obligated to ensure the security and protection of personal data. This clause is inconsistent with the principles of accountability and responsibility of the data controller and therefore cannot serve as a basis for exempting the operator from legal liability. The data controller remains administratively, civilly, and criminally liable in the event of a personal data protection violation resulting from its negligence.

**Keywords : Biometric data; Electronic contracts; Worldcoin.**